

PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: 18/5000.MK/02/2013

Pokja ULP pada Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan Pelelangan *Sederhana* dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Obat-obatan Poliklinik Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2013
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Obat-obatan
Nilai total HPS : Rp.218.588.664,- (Dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2013

2. Persyaratan Peserta

- Paket Pekerjaan ini terbuka untuk penyedia Barang/Jasa yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil pada Subbidang Perdagangan Obat-obatan/Farmasi.
- Memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) atau Memiliki Izin Pendirian Apotek dari Kementerian/Dinas Kesehatan
- Peserta yang belum melakukan registrasi terlebih dahulu wajib registrasi di LPSE Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, setiap hari kerja pukul 10.00 s.d. 14.30WIB.

3. Pelaksanaan Pengadaan

- Pendaftaran dan Pengunduran (download) dokumen pengadaan dapat dilaksanakan melalui *website* <http://lpse.mahkamahkonstitusi.go.id> mulai tanggal 8 s.d. 18 Februari 2013
- Penjelasan dokumen (Aanwijzing) akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013 pukul 11.00 s.d. 12.00 WIB

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Download Dokumen Pengadaan	13/Feb s.d. 19/Feb	10.00 s.d. 16.00 WIB
b.	Pemberian Penjelasan	15 Februari 2013	11.00 s.d. selesai
c.	Upload Dokumen Penawaran	16/Feb s.d. 20/Feb	10.00 s.d. 16.00 WIB
d.	Pembukaan Dokumen Penawaran	20 Februari 2013	14.00 s.d selesai
e.	Pengumuman Pemenang	28 Februari 2013	
f.	Masa Sanggah	28/Feb s.d. 4/Maret	
g.	Penerbitan SPPBJ	6 Maret 2013	

- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa tanda pengenal dan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/penugurus koperasi/kepala cabang/pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.
- Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

7. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan, *softcopy* dan/atau diunduh melalui *website* <http://lpse.mahkamahkonstitusi.go.id/>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 12 Februari 2013

Pokja ULP